

**PENGUKURAN KINERJA PADA BIRO UMUM
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara**

DISUSUN OLEH:

**NAMA : RAHMADANI
NPM : 1732046144
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

POLITEKNIK STIALAN
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : RAHMADANI
NPM : 1732046144
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGUKURAN KINERJA PADA BIRO
UMUM KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 22 Desember 2021

Pembimbing



(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada

Ketua merangkap anggota,



(Arifiani Widjayanti, P.hD)

Sekretaris merangkap anggota

A blue ink signature is written above the name 'Kamida Retta G.'.

Kamida Retta G.

(Kamida Retta Ginting, SE, MM)

Anggota

A blue ink signature is written.

(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmadani

NPM : 1732046144

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengukuran Kinerja pada Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis



(Rahmadani)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengukuran Kinerja pada Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan memberi dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Tintin Sri Murtinah, SE, MM, selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan membuka ruang diskusi bagi penulis untuk menuangkan gagasan dan buah pikir dalam penulisan skripsi tugas akhir ini.
2. Bapak Ibu dosen dan staf di prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan pengajaran, pengalaman dan yang selalu membantu penulis selama berkuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta.

3. Bapak Dr. Sumarjaya, S.KM., M.M, M.F.P, C.F.A, Plt. Kepala Biro Umum, Setjen, Kemenkes yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait bantuan pemerintah.
4. Rekan-rekan dari Biro Umum yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
5. Lita Meini Utami, istri tercinta, Aldrich Ghazi Raqilla Rahmadani, Adskhan Pranaja Rahmadani, anak-anak dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dalam doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan kuliah jurusan ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis terutama dalam pengukuran kinerja. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Biro Umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

(Rahmadani)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmadani

NPM : 1732046144

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengukuran Kinerja pada Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan

Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

(Rahmadani)

ABSTRAK

Rahmadani, 1732046144

PENGUKURAN KINERJA PADA BIRO UMUM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

Skripsi, x hlm, 106 halaman

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Biro Umum yang merupakan salah satu unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal melakukan pengukuran kinerja yang hasilnya di laporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja Tahun 2020 pada Biro umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang ditinjau dari dua aspek yaitu mekanisme pengukuran dan indikator kinerja kegiatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek mekanisme pengukuran kinerja harus ada aturan untuk pemberian penghargaan apabila pencapaian kinerja melebihi target dan pemberian hukuman apabila pencapaian kinerja kurang dari target, pengukuran kinerja dijadikan pedoman atau dasar Biro Umum dalam pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya dibuat pula aturan untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai . Selanjutnya dalam aspek indikator kinerja kegiatan perlu adanya studi banding dengan kementerian lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama, selain itu menggunakan konsultan dari pemerintah ataupun swasta bisa menjadikan tambahan saran untuk menentukan indikator terbaik yang bisa menggambarkan semua tugas dan fungsi Biro Umum.

Kata kunci: Pengukuran, Kinerja

ABSTRACT

Rahmadani, 1732046144

**PERFORMANCE MEASUREMENT IN GENERAL BUREAU
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
IN 2020**

Thesis, x pages, 106 pages

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, through the General Bureau which is one of the echelon II units under the Secretariat General, conducts performance measurements whose results are reported in the Government Performance Accountability Report of the General Bureau of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning Accountability System Performance of Government Agencies and Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 53 of 2014 concerning Technical Guidelines for Performance Agreements, Performance Reporting and Procedures for Reviewing Agency Performance Reports. This study aims to determine the performance measurement in 2020 at the general bureau of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, which is viewed from two aspects, namely the measurement mechanism and activity performance indicators.

The method used in this study is a qualitative description using data collection techniques through interviews and document review. The research instruments used were interview guides and document review guides.

The results show that in the aspect of the performance measurement mechanism there must be rules for awarding if the performance achievement exceeds the target and punishment if the performance achievement is less than the target, performance measurement is used as a guideline or basis for the General Bureau in making management decisions. Furthermore, rules are made for trainings to improve employee performance. Furthermore, in the aspect of activity performance indicators, it is necessary to have comparative studies with other ministries that have the same duties and functions, in addition to using consultants from the government or the private sector can make additional suggestions to determine the best indicators that can describe all the duties and functions of the General Bureau.

Keywords: *Measurement, Performance*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Fokus Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Akademis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengertian Kinerja	11
2. Definisi Organisasi Sektor Publik.....	14
3. Kinerja Organisasi Sektor Publik	15
4. Pengukuran Kinerja	17
5. Pengukuran Kinerja Sektor Publik	22
6. Indikator Kinerja	26
7. Indikator Kinerja Sektor Publik.....	32
B. Konsep Kunci.....	37
C. Model Berpikir	38
D. Pertanyaan penelitian	39
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	40

B. Teknik Pengumpulan Data.....	45
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	49
D. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	51

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	55
1. Sejarah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	55
2. Tugas dan Fungsi Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.....	57
3. Struktur Organisasi Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.....	60
4. Pengukuran Kinerja pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ..	68
B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	72
1. Aspek Mekanisme Pengukuran Kinerja.....	72
2. Aspek Indikator Kinerja Kegiatan	88

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1. Model Berpikir Penelitian.....	38
2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Biro Umum Kemenkes ...	63
3. Sumber Daya Manusia Biro Umum Kemenkes	64
4. Perbandingan Realisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah per Jenis Belanja (jenis bantuan) dari Tahun 2016 sampai dengan 2019	73

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
1. Target dan Realisasi Kinerja Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020.....	6
2. <i>Key Informant</i>	49
3. Rekap Pagu Alokasi Anggaran Awal dan Akhir.....	66
4. Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2020	66
5. Data Target dan Capaian Periode Tahun 2015-2019	70
6. Tujuan pengukuran kinerja Biro Umum Kementerian Kesehatan..	77
7. Proses Pengukuran Kinerja Bagian-bagian Biro Umum Kementerian Kesehatan.....	84
8. Proses Pengukuran Kinerja Bagian-bagian Biro Umum Kementerian Kesehatan.....	89
9. Indikator Kinerja Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan TU Pimpinan dan Protokol.....	91
10. Indikator Kinerja Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS).....	96

11.Indikator Kinerja Jumlah Satker yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).....	104
12.Indikator Kinerja Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan.....	103



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kinerja sektor publik atau kinerja Pemerintah Republik Indonesia merupakan topik yang sepertinya tidak pernah bosan untuk dibahas oleh masyarakat. Stigma negatif terhadap pemerintahan yang melekat di masyarakat terkait birokrasi berbelit, oknum pegawai pemerintahan yang mempersulit urusan masyarakat dan juga pegawai pemerintahan yang terkesan santai masih menjadi terus melekat di pemikiran masyarakat yang menjadikan kinerja pemerintah terkesan rendah. Hal ini bisa terlihat dari pemberitaan di berbagai media cetak terutama media online. Dengan adanya media online, salah satunya yaitu media sosial, masyarakat bisa berkomentar negatif tentang kinerja pemerintah dan komentar tersebut bisa dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok tanah air yang menambah buruk citra kinerja pemerintah di mata masyarakat Indonesia

Terkait dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan 3 peraturan, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan tercipta birokrasi pemerintah yang professional dengan berintegritas, berkinerja yang baik, bersih dari KKN, berdedikasi serta meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat.

Reformasi birokrasi dengan berangkat dari Nawa Cita memiliki arah kebijakan penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan, penerapan *open government*, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, penerapan manajemen aparatur sipil negara, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi perubahan *mind-set* dan *culture-set* aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Untuk melihat adanya peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan pada reformasi birokrasi tentunya diperlukan pengukuran kinerja. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mahmudi (2015:7):

pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan sektor swasta. Di sektor swasta, tujuan utama organisasi lebih jelas yaitu menghasilkan laba sebagai *bottom line* yang dapat diukur dengan ukuran finansial. Keberadaan organisasi bisnis adalah untuk menjual barang dan jasa dalam rangka menciptakan kekayaan dan

kesejahteraan bagi pemiliknya. Berbeda dengan organisasi sektor publik, kehadirannya adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan terbaik yang hal itu seringkali sulit diukur dengan ukuran finansial.

Perhatian terhadap pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja organisasi sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep manajemen berbasis kinerja, karena manajemen berbasis kinerja menghendaki organisasi sektor publik untuk membuat sistem akuntabilitas berbasis hasil (*results-based accountability system*).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Salah satu satuan kerjanya yaitu Biro Umum di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, senantiasa proaktif menciptakan sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel serta berusaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, maka disusunlah laporan pelaksanaan

kinerja satuan kerja Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 yang didalamnya terdapat pengukuran kinerja Biro Umum pada tahun 2020.

Maksud dari pengukuran kinerja Biro Umum tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas sesuai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang berkaitan, bahwa setiap instansi pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang didalamnya terdapat pengukuran kinerja. Tujuan dari pengukuran kinerja Biro Umum Tahun 2020 adalah :

1. mengetahui capaian kinerja kegiatan program yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan,
2. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menuju kawasan penyelenggaraan pemerintah wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),
3. memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyusunan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja Biro Umum serta sebagai bahan masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi serta perencanaan anggaran yang akan datang sehingga diharapkan terwujudnya capaian yang baik.

Secara umum, dalam tahun 2020 satuan kerja Biro Umum telah mencapai target kinerja. Dari 4 indikator kinerja kegiatan, terdapat 3 capaian indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan TU Pimpinan dan Protokol, Jumlah Satker yang telah melaksanakan *Self Assessment* Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat, Jumlah Satker yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, sedangkan 1 capaian indikator lainnya sama dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat kita lihat ditabel berikut :

Tabel 1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan ketatausahaan Kementerian dalam mendukung terciptanya <i>Good Governance</i>	1. Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan TU Pimpinan dan Protokol	80%	86,69%
		2. Jumlah Satker yang telah melaksanakan <i>Self Assessment</i> Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS)	44 Satker	52 Satker

		3. Jumlah Satker yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)	88 Satker	88 Satker
		4. Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan	45 satker	46 satker

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata target dan realisasi dari 4 indikator kinerja semua mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik, tetapi apakah tabel tersebut benar-benar menggambarkan situasi kinerja yang sesungguhnya karena tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Pada tahun 2020, dunia global termasuk Indonesia sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap manusia tidak bisa berinteraksi secara langsung seperti biasa tentu saja mempengaruhi kinerja instansi/perusahaan bahkan banyak perusahaan yang bangkrut. Dalam penentuan indikator kinerja terlihat tidak menggambarkan tugas dan fungsi dari Biro Umum Kementerian

Kesehatan RI yang sesungguhnya. Indikator kinerja kegiatan hanya menampilkan sebagian kecil tugas dan fungsi dari Biro Umum.

Banyaknya anggapan bahwa pengukuran kinerja pada instansi pemerintah hanya untuk menyelesaikan kewajiban atas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tanpa melihat tujuan sebenarnya yaitu sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang lebih baik untuk masa berikutnya demi tercapainya peningkatan pelayanan dan kepuasan publik atas kinerja pemerintah. Hal ini dikemukakan di artikel Ahyaruddin dan Akbar (2016:1-22) :

Beberapa pejabat publik di organisasi pemerintah daerah (OPD) mengatakan bahwa penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) selama ini hanya untuk memenuhi dan menyelesaikan kewajiban mereka karena dipaksa oleh aturan yang ada.

Tahun 2020 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024, yang tentu saja berbeda dengan periode sebelumnya, sehingga menjadikan tantangan bagi Biro Umum untuk melakukan penyesuaian. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Isi renstra 2015-2019 tentu berbeda dengan renstra 2020-2024. Oleh karena

itu, indikator kinerja kegiatan Biro Umum 2020-2024 harus sesuai dengan renstra 2020-2024.

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang di atas, serta adanya penyesuaian yang perlu dilakukan dalam renstra 2020-2024, kaitannya dengan kinerja kegiatan Biro Umum pada tahun 2020, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai pengukuran kinerja pada Biro Umum Kementerian Kesehatan.

B. Fokus Permasalahan

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengukuran kinerja Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 ?
2. Bagaimana indikator kinerja kegiatan Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengukuran kinerja terkait :

1. Mekanisme pengukuran kinerja;
2. Indikator kinerja kegiatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat penelitian terhadap kepentingan akademik.

Mengetahui bagaimana pengukuran kinerja Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020. Informasi ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menambah teori-teori khususnya ilmu Administrasi Negara, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang sejenisnya dan selanjutnya akan menambah wawasan;

2. Manfaat terhadap dunia praktis.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dari saran – saran bagi pimpinan di dalam mengambil suatu keputusan untuk memperbaiki situasi yang ada saat ini.